

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintahan Daerah menurut Undang-undang No 23 Tahun 2014 merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara. Penyelenggaraan daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, dan keadilan.

Dalam menjalankan pemerintahan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kabupaten Demak terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kantor, Kecamatan, dan Kelurahan. Organisasi Perangkat Daerah mempunyai tugas pokok dan fungsi masing-masing dalam penyelenggaraan urusan daerah untuk membantu kepala daerah dalam memenuhi pelayanan masyarakat secara optimal. Untuk menciptakan pelayanan publik yang optimal diperlukan aparat birokrasi pemerintah yang memiliki kemampuan responsif yang tinggi, disiplin, komitmen dan bertanggung jawab.

Akuntansi menurut *American Accounting Association* (1966) merupakan suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi atau entitas yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan (Afiah, 2010:5). Suatu laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas. Pelaksanaan

akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya berupa laporan keuangan. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi dan pengungkapan atas segala aktifitas dan kinerja finansial di institusinya. Reformasi di institusi pemerintah mulai dibangun karena menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik baik di pusat maupun daerah dengan dikeluarkannya peraturan-peraturan mengenai otonomi daerah, pengenalan perangkat teknologi untuk mempercepat proses organisasi, dan penerapan sistem organisasi dengan berbasiskan *good governance* (Mardiasmo, 2009).

Instansi pemerintah tidak lepas dari berbagai macam tindakan kecurangan yang dilakukan oleh pihak luar maupun pihak dalam instansi itu sendiri. Tindakan kecurangan yang dilakukan di sektor pemerintah lebih menonjol dibandingkan dengan sektor swasta karena sistem pengelolaan keuangan di pemerintah dituntut untuk transparan dan akuntabilitas. Kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum pemerintah sulit untuk terdeteksi karena pelaku kecurangan biasanya merupakan orang yang dipercaya untuk menjalankan suatu proyek dalam organisasi tersebut (Adinda, 2015).

Kecurangan akuntansi di Indonesia berkembang secara luas yang menimbulkan kerugian yang sangat besar hampir diseluruh sektor. Kecurangan merupakan suatu kesalahan yang dilakukan seseorang dengan sengaja untuk mendapatkan keuntungan dengan cara merugikan orang lain (Wulandari dan Ahmad, 2015 dalam Rizky dan Fauziah, 2017). Menurut (Meliany, 2013) kecurangan bisa diartikan seperti sikap seseorang yang tidak mau berusaha untuk

mendapatkan apa yang diinginkan dengan cara bekerja keras melainkan untuk mendapatkan apa yang diinginkan seseorang akan menggunakan jalur jalan pintas. Seseorang yang melakukan kecurangan akan memiliki sikap serakah, iri, dengki, dan biasanya mereka akan mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya agar dapat dianggap orang lain sebagai orang paling kaya. Kecurangan bisa berupa pencurian, penggelapan, menyembunyikan, KKN dan masih banyak lainnya. (Alou, dkk, 2017) menyatakan kesempatan untuk melakukan kecurangan tergantung pada kedudukan pelaku terhadap objek kecurangan. Secara umum, manajer suatu organisasi mempunyai kesempatan lebih besar untuk melakukan kecurangan daripada pegawainya.

IAI (2001) menjelaskan kecurangan akuntansi sebagai salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan (salah saji atau penghilangan dengan sengaja jumlah dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan) dan penyalahgunaan yang berkaitan dengan pencurian aktiva entitas yang berakibat laporan keuangan disajikan tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Menurut (Tuanakotta, 2010 :195) berdasarkan teori *Fraud Triangle* yang dikemukakan oleh Donald R. Cressey menyatakan bahwa pada dasarnya kecurangan terjadi karena adanya tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), serta rasionalisme (*razionalization*). Cabang fraud terdiri atas *Assets Misappropriation* (penyalahgunaan aset), *Fraud Statement* (kecurangan laporan keuangan) dan korupsi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan kecenderungan kecurangan akuntansi salah satunya adalah efektifitas sistem pengendalian internal. Menurut

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 dalam Sari, dkk (2015) sistem pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

(Widyaswari dkk, 2017) Penerapan pengendalian internal efektif yang didukung dengan regulasi yang memadai akan mencegah berbagai bentuk persoalan dan ketidakwajaran yang merugikan berbagai pihak yang berkepentingan. Keefektifan pengendalian internal mempunyai pengaruh yang besar dalam upaya pencegahan kecenderungan kecurangan akuntansi. Adanya pengendalian internal yang efektif, memungkinkan terjadinya pengecekan silang (*cross check*) terhadap pekerjaan seseorang oleh orang lain. Hal ini menurunkan peluang terjadinya kecenderungan kecurangan dan meminimalisir kesalahan. (Wilopo, 2006 dalam Chintyana dkk, 2017) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal yang efektif dapat mengurangi kecenderungan kecurangan akuntansi. Jika suatu sistem pengendalian internal lemah, maka kekayaan perusahaan dan informasi akuntansi yang ada tidak dapat dipercaya.

Faktor lain yang mempengaruhi terjadinya kecenderungan kecurangan adalah tidak terpenuhinya keadilan didalam organisasi tempat pegawai bekerja. Menurut (Sumbayak, 2017) apabila didalam suatu organisasi terdapat ketidakadilan maka akan mengakibatkan pegawai merasa tidak dihargai dan merasakan lingkungan kerja yang kurang kondusif sehingga dapat menimbulkan

kemarahan, kebencian dan pemberontakan serta protes terhadap organisasi atau instansi ditempat bekerja. Hal inilah yang memberikan tekanan atau dorongan seseorang untuk melakukan tindakan yang menyimpang dari aturan yang berlaku demi kepuasannya tercapai seperti berbuat kecurangan. Namun, apabila keadilan didalam organisasi sudah terpenuhi dengan baik maka produktifitas kinerja pegawai akan meningkat. Karena pegawai telah merasakan kepuasan dan keseimbangan antara hak dan kewajibannya sehingga, menghilangkan motivasi untuk melakukan tindakan yang menyimpang.

Kesesuaian kompensasi juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku kecenderungan kecurangan akuntansi. Dengan kompensasi yang sesuai, perilaku kecenderungan kecurangan akuntansi diharapkan dapat berkurang. Individu diharapkan telah mendapatkan kesesuaian kompensasi dan tidak melakukan perilaku yang menyimpang apalagi melakukan tindakan kecurangan dalam akuntansi demi memaksimalkan keuntungan pribadi (Chintyana dkk, 2017).

Selain kesesuaian kompensasi, perilaku tidak etis juga merupakan faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan kecenderungan kecurangan akuntansi. Menurut Tang et al (2003) dalam Dewi (2017) perilaku tidak etis dapat berupa penyalahgunaan kedudukan atau posisi, penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan sumber daya organisasi serta perilaku yang tidak berbuat apa-apa. Penyebab terjadinya perilaku tidak etis adalah kurangnya pengawasan manajemen dimana hal tersebut dapat memberikan kesempatan seseorang untuk

melakukan tindakan tidak etis berupa kecurangan yang dapat merugikan instansi atau lembaga itu sendiri.

Banyak hal yang menjadi alasan seseorang untuk melakukan tindakan menyimpang salah satunya korupsi. Dalam melakukan tindakan kecurangan, seseorang memiliki motivasi yang beranekaragam. Kasus kecurangan akuntansi di Indonesia terjadi secara berulang-ulang. Institusi pemerintahan tidak luput dari adanya kecurangan akuntansi, terlebih lagi terjadi pada pemerintah daerah. Berdasarkan survey tahunan yang dikeluarkan oleh *Transparency International* yang di publikasikan pada tahun 2018 diperoleh data bahwa Indonesia merupakan Negara terkorup nomor 96 di bawah Negara Timor Leste yang menempati urutan ke 91. Hal ini membuktikan dengan banyaknya kasus penyalahgunaan dan penggelapan anggaran negara di pemerintahan.

Salah satu kasus korupsi yang terjadi pada tahun 2015 di Kabupaten Demak adalah terkait dengan penyimpangan dana pengadaan sarana teknik ilmu komputer (TIK) untuk 103 SD dan SDLB yang dilakukan oleh Muhtar Lutfi kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak. Anggarannya berasal dari APBD setempat tahun 2012 dengan pagu Rp 2,9 miliar. Total kontrak Rp 2,23 miliar, dengan perhitungan sementara kerugian Rp 1,3 miliar. Namun dalam perjalanan pengadaannya, ternyata spesifikasi komputer maupun laptop lebih rendah dari perjanjian. Sumber :(www.news.detik.com:Minggu, 29 September 2018)

Penelitian yang dilakukan oleh (Chintyana, dkk 2017) menyatakan bahwa efektifitas sistem pengendalian internal dan persepsi kesesuaian kompensasi

berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sari, dkk 2015) dan (Radhiah, 2016). Sedangkan terdapat perbedaan hasil yang dikemukakan oleh (Meliany, 2013) yang menyatakan bahwa keefektifan pengendalian internal dan kesesuaian kompensasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Hasil penelitian yang dikemukakan oleh (Chintyana, dkk 2017) menyatakan bahwa keadilan organisasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Namun terdapat hasil penelitian yang berbeda yang dilakukan (Sumbayak, 2017) menyatakan bahwa keadilan organisasi berpengaruh positif.

Penelitian yang dikemukakan (Rizky dan Fauzia, 2017), (Dewi, 2017) dan (Ahriati, 2015) menunjukkan hasil yang sama, bahwa perilaku tidak etis berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, hal yang mendasari dilakukannya penelitian ini adanya hasil penelitian yang tidak konsisten dan isu mengenai kasus korupsi di Kabupaten Demak masih banyak yang terjadi, tidak sedikit kasus korupsi yang sampai sekarang masih belum terselesaikan. Penelitian ini mengacu dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Chintyana, dkk, 2017). Penelitian (Chintyana, dkk, 2017) menyarankan adanya penambahan variabel untuk penelitian selanjutnya. Penelitian ini menambahkan variabel perilaku tidak etis, penambahan variabel tersebut dilakukan karena perilaku tidak etis merupakan salah satu faktor yang dapat memicu terjadinya kecenderungan kecurangan akuntansi (Dewi, 2017).

Selain penambahan variabel perilaku tidak etis, perbedaan penelitian ini dengan peneliti terdahulu terdapat pada objek penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Demak, sedangkan dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Chintyana, dkk 2017) dengan judul pengaruh efektifitas sistem pengendalian internal, keadilan organisasi, dan kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Buleleng.

Maka dengan ini peneliti tertarik mengambil judul penelitian mengenai “**PENGARUH EFEKTIFITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, KEADILAN ORGANISASI, KESESUAIAN KOMPENSASI DAN PERILAKU TIDAK ETIS TERHADAP KECENDERUNGAN KECURANGAN AKUNTANSI (STUDI EMPIRIS PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN DEMAK)**”

1.2 Ruang Lingkup

Dalam penelitian ini penulis membahas permasalahan sebagai berikut :

1. Penelitian ini mengambil obyek Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Demak.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Demak dibatasi pada variabel efektifitas sistem pengendalian internal, keadilan organisasi, kesesuaian kompensasi dan perilaku tidak etis.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah efektifitas sitem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Demak?
2. Apakah keadilan organisasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Demak?
3. Apakah kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Demak?
4. Apakah perilaku tidak etis berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Demak.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh efektifitas sistem pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Demak.

2. Untuk menganalisis pengaruh keadilan organisasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Demak.
3. Untuk menganalisis pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Demak.
4. Untuk menganalisis pengaruh perilaku tidak etis terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Demak.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini secara teoritis diharapkan memberikan pengetahuan bagi pembacanya dan dari hasil penelitian dapat dipakai sebagai pertimbangan pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Demak dalam melibatkan variabel efektifitas sistem pengendalian internal, keadilan organisasi, kesesuaian kompensasi dan perilaku tidak etis terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan untuk mengambil kebijakan yang dianggap perlu atas dasar dari hasil penelitian.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.